

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Sumatera Selatan

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666443-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602574-30012024081153

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprsumsel@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 08:11:53



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.442 PALEMBANG 30125

Nomor Telepon : 0711379555

Penjelasan Umum : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Periode 31 Desember 2023 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Periode 31 Desember 2023 menggambarkan proses implementasi Tata Kelola di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan sepanjang tahun 2023. PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance / GCG) yang baik diperlukan dalam kelangsungan kegiatan usaha perbankan. Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen Bank BPR Sumsel terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Hendera	Direktur Utama	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Membawahi fungsi & tgjwb Dirops & Dirkep serta Bagian Ops, Bagian Pemasaran, Bagian Kredit, Bagian IT, Bagian Pengendalian Internal. 2. Menjalankan tugas & wewenang, berdasarkan Akte Pendirian & AD prshn 3. Menerapkan Tata Kelola Pershn. 4. Bertanggung jawab terhadap pencapaian, rencana kerja & anggaran. 5. Mengevaluasi kinerja Perusahaan & menetapkan strategi & langkah perbaikan 6. Memutuskan, mengevaluasi batasan kewenangan limit transaksi biaya ops pershn & BWMK. 7. Bertanggung jawab terhdp pertumbuhan kredit pinjaman & pendanaan. 8. Mengawasi & memeriksa keputusan yang dibuat pejabat. 9. Memimpin pembahasan & bertanggung jawab atas penyusunan RBB. 10. Memastikan peningkatan kompetensi SDM .11. Memastikan & mengembangkan budaya manrisk. 12. Meneliti, menetapkan skala prioritas produk perbankan yang akan dikembangkan. 13. Menyetujui/menolak pemberian Aproval Kredit, transaksi perbankan. 14. Bertanggung jawab mengenai & ketepatan waktu pelaporan ke pihak ke-3. 15. Bersama anggota Direksi lain membahas & membuat PP. 16. Menandatangani surat berharga & dokumen penting perusahaan. 17. Menetapkan & menandatangani surat keputusan Direksi. 18. Memimpin komite kredit & komite lain. 19. Bertanggung jawab atas pemeriksaan KAP. 20. Bertanggung jawab bersama direksi lain follow up temuan pemeriksaan eksternal. 21. Melakukan evaluasi temuan SKAI. 22. Menandatangani secara counter sign surat berharga & dokumen penting , PK dgn nsbh, surat keputusan direksi bersama direksi lain. 23. Memfasilitasi RUPS. 24. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM. 25. Berwenang melakukan survey cadeb & memutuskan kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan Dekom. 26. Berwenang menandatangani PK berdasarkan keputusan persetujuan komite kredit. 27. Membawa misi pengenalan pershn ke umum dgn melakukan fungsi humas & hubungan baik dgn nasabah & pejabat OJK & Pemda. 28. Melibatkan diri dlm kepengurusan perbarindo & Asosiasi Perbankan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Edi Siswanto	Direktur	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Membawahi & mensupervisi fungsi & tanggung jawab pinca, bagian operasional, bagian umum & SDM & bagian penagihan. 2. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi & mengendalikan, monitoring pelaksanaan operasional & penagihan kredit, termasuk approval kredit, transaksi pendanaan, dan pengendalian biaya ops. 3. Berwenang menjaga likuiditas perusahaan. 4. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan & koordinasi dlm hal keuangan kebutuhan operasional perusahaan.5. Mengawasi & memeriksa tindakan & keputusan bawahan 6. Berwenang terhadap limit biaya ops, kewenangan penghapusan atau pengurangan tunggakan.7. Berwenang terhadap perbaikan NPL termasuk penyelesaian kredit bermasalah. 8. Berwenang mengajukan WO, hapus tagih, AYDA debitur bermasalah kepada Dirut 9. Pengelolaan SDM. 10. Turut bertanggung jawab dlm penyusunan RBB.11. Turut Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diwajibkan pihak ketiga seperti OJK, BPK & lainnya.12. Bersama anggota direksi lain membahas, mereview & membuat peraturan perusahaan sebelum diajukan & disahkan Direksi & Dekom.13. Menandatangani secara counter sign surat berharga & dokumen penting , PK dengan nasabah & surat keputusan direksi 14. Melakukan tugas intern lain berupa penandatanganan penunjukan Kuasa Bank untuk berurusan dgn pihak ketiga15. Berwenang bersama Kabag untuk mengkaji, memperbaiki dan memenuhi follow up temuan baik temuan SKAI atau OJK 16. Turut memberikan rumusan dlm komite lainnya untuk dijalankan unit kerja operasional perusahaan. 17. Berwenang membeikan persetujuan kredit sesuai kewenangan limit memutuskan kredit, atau menyetujui/merekomendasi kredit bersama Dirut.18 Memberikan persetujuan Otoritasi terhadap kewenangan limit baik kredit atau operasional.19 Turut membina hubungan baik dengan nasabah, relasi bank & pejabat dilingkungan OJK dan Pemda 21 Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, disiplin & totalitas</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Bakhrum Setiawan	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Membawahi dan mensupervisi fungsi dan tanggung jawab bagian Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. 2. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi. 3. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengadilan terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko 4. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR. 5. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.6. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki Bank sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Memantau ketetapan pelaporan yang diamanahkan dalam peraturan OJK 8. Ikut serta melengkapi dan melaporkan hasil temuan audit baik internal dan eksternal. Menjaga integritas, disiplin, totalitas, independent dan tidak melakukan fraud. 9. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 10. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya 11. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR 12. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR 13. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.14. Menjaga integritas, disiplin, totalitas, independen dan ikut serta mengkampanyekan anti fraud

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Bakhnir Rasyid	Komisaris Utama	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung Jawab kpd Pemegang Saham melalui RUPS. 2. Mewakili pemegang saham dlm mengangkat & memberhentikan Anggota Direksi, sbml diajukan untuk disahkan dalam RUPS. 3. Melakukan monitoring ats jalannya prshn & kebijakan yg dilaksanakan olh Direksi. 4. Melakukan pengawasan ats kebijakan Direksi dlm menjalankan prshn, mengevaluasi & menyetujui rencana kerja & anggaran tahunan. 5. Mengevaluasi & memutuskan permohonan/usulan Direksi yg berkaitan dgn transaksi atau kegiatan usaha yg lampau kewenangan Direksi. 6. Melaksanakan & menjalankan & wewenang yg ditetapkan Akte Pendirian & AD prshn 7. Melakukan review & pembahasan brsm Direksi terkait RBB setiap tahunnya yan utk diajukan pd RUPS utk disetujui 8. Melaksanakan scr cermat hasil pemeriksaan intern & ekstern oleh OJK & Akuntan Publik 9. Menyusun & menyampaikan kpd Pemegang Saham, OJK, & pihak eksternal lain laporan ttg hsl pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja Direksi. 10. Bersama Direksi membahas, menyetujui & mengesahkan peraturan prshn. 11. Secara berkala menghadiri Rapat Direksi untuk berikan pengarahan & tanggapan atas hsl yg dicapai prshn. 12. Memutuskan & mengesahkan jmlh deviden yang akn dibagikan pd pemegang saham th berakhir thn buku prshn. 13. Membahas & memberikan persetujuan kredit ats permohonan kredit. 14. Menyetujui & mengesahkan rancangan skala gaji & Fasilitas & pembagian bonus kepada Direksi. 15. Memimpin RUPS yg dilaksanakan tahunan 16. Melaksanakan RUPSLB bl ada permintaan pemegang saham, shbngn trjd hal luar biasa pd prshn 17. Turut melakukan fungsi humas dlm bawa misi prshn kpd masyarakat 18. Melakukan rapat Komisaris berkala 4 kali setahun. 19. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola pd setiap kegiatan usaha BPR di slrh tingkatan organisasi 20. Mengarahkan & memantau rencana pengembangan & pengadaan IT BPR yang bersifat mendasar 21. Melakukan pengawasan ats pelaksanaan tggjwb Direksi thd penerapan program APU PPT</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Hendra Jaya	Komisaris dan Independen	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab kpd pemegang saham melalui RUPS. 2. Memastikan terselenggaranya tata kelola pd tiap kegiatan BPR Sumsel dislrh jenjang 3. Melakukan pengawasan ats kebijakan direksi dlm jalankan kinerja prshn 4. Memastikan direksi menindaklanjuti hsl temuan SKAI, auditor eksternal, hsl pengawasan Komisaris, OJK 5. Menjalankan wewenang berdasar Akte Pendirian & AD prshn. 6. Melakukan monitoring scr berkesinambungan ats jalannya prshn & kebijakan direksi. 7. Membahas, menyetujui & sahkan RBB & anggaran yang disusun olh Direksi. 8. Melakukan pemeriksaan ats kebenaran laporan mnjmn & melaporkan hasil pemeriksaan & laporkan hasil pemeriksaan kpd pemegang saham berkala.9. Melakukan secara cermat hsl pemeriksaan ekstern yang dilakukan olh OJK & Akuntan Publik 10. Menyusun & menyampaikan kpd OJK & Pemegang Saham laporan scr berkala hsl pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja Direksi. 11. Bersama dgn Direksi membahas, menyetujui & sahkan peraturan prshn. 12. Secara berkala trt hadir rapat Direksi utk berikan pengarahan & tanggapan ats hsl prshn & berikan nasehat kepada Direksi. 13. Memutuskan & mengesahkan jmlh deviden yag akan dibagi pd pemegang saham stlh berakhir tahun buku prshn. 14. Membahas & memberikan persetujuan kredit ats permohonan kredit 15. Menyetujui & mengesahkan rancangan skala gaji & fasilitas & pembagian bonus kpd direksi & pegawai & meminta persetujuan Pemegang Saham pd RUPS.16. Memantau jalannya prshn scr berkesinambungan & lakukan analisis hsl pengawasan & laporkan kpd OJK & Pemegang Saham (bl diminta olh OJK). 17 Memimpin RUPS scr tahunan gn laporkan hsl kerja Direksi selama 1 thn .18 Melaksanakan RUPSLB bl ada permintaan pemegang saham, shbgn terjadi hl luar biasa pd prshn. 19 Turut mlkn fungsi humas dlm bw misi prshn pd msyrkt & fungsi marketing bg kepentingan prshn. 20 Melakukan rapat Komisaris & rapat dgn Komite Audit & Komite Pemantau Risiko berkala, paling sedikit 4 kali thn.

Rekomendasi Kepada Direksi

Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	1.Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2.Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI, Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku bagi BPR, Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3.Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris. 4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan. 5. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan. 6.Menjaga kerahasiaan dokumen, data & informasi kepada pihak ketiga tanpa seijin dari Direksi & Dewan Komisaris. 7.Menyusun dan memperbarui Pedoman & Tata Tertib Kerja Komite Audit. 8.Menghadiri rapat Komite Audit & rapat dgn Direksi apabila di undang
2	Komite Pemantau Risiko	1.Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut 2.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 3.Melakukan pemantauan atas strategi - strategi usaha dan potensi risikonya. 4.Melakukan Evaluasi atas kebijakan pengelolaan risiko dan pelaksanaannya. 5. Memantau dan memastikan profil risiko serta laporan profil risiko yang telah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1.Mengevaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi. 2.Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi. 3.Komite remunerasi dan nominasi paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, Key Performance Indicator pegawai atau prestasi kerja individual dan Sasaran dan strategi jangka menengah atau panjang Perseroan. 4.Melakukan seleksi anggota baru Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 5.Menyusun dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab kerja yang direalisasikan di tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Bakhnir Rasyid	Pemerintahan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Ya
2	Hendra Jaya	Hukum	Ketua	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
3	Hilman Anwar	Perbankan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
4	Pery Aryadi	Perbankan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
5	Wenni Ariputri	SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi dari anggota komite sudah memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan BPR Sumsel

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Pemantau Risiko	1. Membuat laporan bulanan. 2. Membuat laporan triwulan ke Gubernur 3. Membuat laporan pengawasan komisaris per semester I 4. Membuat laporan pengawasan komisaris triwulan 5. Menghadiri rapat komite pemantau resiko 6. Memantau dan mengevaluasi tugas komite manajemen risiko satuan kerja manajemen risiko. 7. Mengevaluasi tentang kesesuaian antar kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 8. Memantau dan memastikan profil Risiko serta Laporan profil Risiko telah dilakukan oleh pejabat Kepala satuan kerja manajemen risiko.	1. Membuat laporan bulanan Jumlah Aset, DPK, Kredit, NPL, Laba Rugi, Transaksi Aktiva yang dihapus buku, Biaya Administrasi dan Umum, membuat surat Evaluasi kinerja 2. Laporan Pengawasan Komisaris per Triwulan I ke Gubernur dan PT SEG. 3. Membuat Laporan Pengawasan Komisaris Ke OJK dan Gubernur Sumatera Selatan dan PT SEG. 4. Membuat Laporan Triwulan III ke Gubernur dan PT. Sumsel Energi Gemilang (SEG) 5. Rencana perubahan struktur organisasi 6. Membahas pelaksana tugas (PLT) Dirut Bank BPR 7. Hasil pemeriksaan Audit (Exit Meeting Kantor Pusat BPR Sumsel 15 maret 2023 8. Pembahasan laporan Kinerja Triwulan I Periode Januari sampai Maret 2023 tanggal 03 Mei 2023 9. Pembahasan Exit Meeting dengan KAP Tanzil Djunaidi dan rekan 10. Pelaksanaan Tugas (PLT) Dirut Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan hasil pemeriksaan KAP. 11. Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi 12. Pembahasan evaluasi kinerja bulan Mei 2023 dan rencana evaluasi kinerja triwulan II 14 Juni 2023 13. Evaluasi kinerja Direksi semester I tahun 2023 dan isu-isu kebijakan bisnis dan strategis BPR Sumsel 12 Juli 2023 14. Persetujuan rekomendasi penggunaan jasa KAP tahun buku 2023 PT BPR Sumsel 15. Pembahasan terkait mengontrol PPAP tiap bulan, rencana Bisnis 5 tahun dan RKAT/RBB 1 tahun, Anggaran untuk Dewan Komisaris dalam menyusun RBB, perpanjangan kontrak a.n Hilman Anwar 8 November 2023 16. Pembahasan rencana bisnis bank 2024 29 November 2023 17. Pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko sudah mempunyai tanggung jawab yang jelas dan berjalan dengan baik 18. Kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik sejalan dengan penerapan dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 19. Pelaporan profil risiko dan telah dilaksanakan oleh pejabat eksekutif Manajemen Risiko	6

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
2	Komite Audit	1. Membuat laporan bulanan. 2. Membuat laporan Triwulan ke Gubernur 3. Membuat laporan pengawasan komisaris Per Semester I 4. Membuat Laporan Pengawasan Komisaris Triwulan 5. Menghadiri Rapat Komite Audit. 6. Memantau dan mengevaluasi Laporan Audit Internal (SKAI) Semester I 7. Memantau dan mengevaluasi Laporan Audit Internal (SKAI) Semester II 8. Merekomendasikan Akuntan Publik Kekomisaris	1. Jumlah Aset, DPK, Kredit, NPL, Laba Rugi, Transaksi Aktiva yang dihapusbuku, Biaya Administrasi dan Umum, membuat surat evaluasi kinerja pertriwulan ke Direksi 2. Laporan Pengawasan Komisaris per Triwulan I ke Gubernur dan PT SEG. 3. Membuat Laporan Pengawasan Komisaris ke OJK dan Gubernur Sumatera Selatan dan PT.SEG. 4. Membuat Laporan Triwulan III ke Gubernur dan PT.Sumsel Energi Gemilang (SEG) 5. Rencana perubahan struktur organisasi 6. Membahas penanaman modal, pengunduran Direktur Utama Bpk Marzuki 7. Hasil pemeriksaan Audit (exit meeting) kantor pusat BPR Sumsel 15 maret 2023 8. Pembahasan laporan kinerja triwulan I periode januari sampai maret 2023 9. Pembahasan exit meeting dengan KAP Tanzil Djunaidi dan rekan 10. pembentukan komite audit dan komite pemantauan resiko serta komite remunerasi dan nominasi 8 mei 2023 11. Pembahasan Evaluasi kinerja bulan mei 2023 dan rencana evaluasi kinerja triwulan II 14 juni 2023 12.Evaluasi kinerja Direksi semester I tahun 2023 dan isu-isu kebijakan bisnis dan strategis BPR Sumsel 12 juli 2023 13. Persetujuan rekomendasi penggunaan jasa KAP tahun Buku 2023 POT Bank BPR Sumsel 14.Pembahasan terkait mengontrol PPAP tiap bulan, rencana bisnis 5 tahun dan RBB 1 tahun, anggaran untuk dewan komisaris dalam menyusun RBB, perpanjangan kontrak kerja a.n hilman anwar 8 november 2023 15.Audit periode 1 pada kantor cabang lahat yang dilaksanakan tanggal 13 sampai 17 maret 2023 16. Audit periode 1 pada kantor pusat dilaksanakan tanggal 12 juni sampai 14 juli 2023 17. Audit periode 1 pada kantor cabang sekayu pada tanggal 13 sampai 17 Februari 2023 18.Audit periode II pada kantor cabang lahat tanggal 28 agustus 2023 sampai 01 september 2023 19.Audit periode II pada Kantor pusat pada tanggal 19 sampai 27 oktober 2023 KAP Zubaidi komaruddin	6
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi diantaranya evaluasi dan rekomendasi terhadap gaji dan honorarium pengurus serta gaji dan tunjangan pegawai 2. menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi yaitu menyusun dan merekomendasikan terhadap kekosongan direksi dan dewan komisaris 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengevaluasi terkait rencana pendidikan dengan aktual biaya pendidikan yang telah dilakukan 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Key Performance Indicator pegawai, agar sejalan dengan rencana bisnis perusahaan	1. rekomendasi terkait pemenuhan calon direksi dan dewan komisaris 2. rekomendasi terkait jasa pengabdian direksi dan dewan komisaris 3. rekomendasi terkait penyesuaian gaji direksi dan honorarium dewan komisaris 4. rekomendasi terkait pembagian laba tahun buku 2022 yaitu berupa jasa produksi, tantiem, dan cadangan CSR 5. evaluasi terkait KPI pegawai 6. melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penggunaan cadangan pendidikan 7. rekomendasi terkait tunjangan transport dan uang makan direksi dan pegawai	4

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sudah membuat program kerja dan merealisasikan program kerja tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hendera	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Bakhrum Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Edi Siswanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hendera	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Edi Siswanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Bakhrum Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Bakhnir Rasyid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Hendra Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga di PT Bank BPR Sumsel

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Bakhnir Rasyid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Hendra Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga di PT Bank BPR Sumsel

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	670713602	2	454471200
2	Tunjangan	3	369109976	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1039823578		454471200

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	3 unit	1 unit
3	Asuransi Kesehatan	Inhealth	Inhealth
4	Fasilitas lainnya	Asuransi Purna Jabatan	Asuransi Purna Jabatan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,50	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,10	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,70	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27-01-2021	3	Perpanjangan kontrak kerja Bpk Pery Aryadi (Anggota Komite Pemantau Resiko)
2	05-03-2021	5	Pembahasan laporan kinerja triwulan I periode Januari sampai Maret 2023
3	08-03-2021	5	Pembahasan Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2023 dan Rencana evaluasi kinerja Triwulan II
4	29-03-2021	5	1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI atas dugaan Fraud pada KC Lahat 2.Pencairan kredit yang masih tergolong baru tetapi langsung macet 3.Persetujuan Dekom terhadap usulan penghapusbukuan kredit macet 4,Evaluasi kinerja dari bulan Januari s.d Juli 2023
5	28-05-2021	4	1.Terkait mengontrol PPAP tiap bulan 2.Rencana Bisnis 5 tahun dan RBB tahunan 3.Anggaran untuk dewan komisaris dalam menyusun RBB 4.Perpanjangan perjanjian kontrak kerja a.n Hilman Anwar untuk diperpanjang

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Bakhnir Rasyid	5	0	100,00
2	Hendra Jaya	4	0	80,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	5	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah kasus yang telah selesai 4 perdata. Dalam proses penyelesaian 1 perdata

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230106	Kegiatan Sosial	Bantuan CSR Masjid Babussalam	Pengurus yayasan Masjid Babussalam	1.000.000
2	20230130	Kegiatan Sosial	CSR Pemilihan Putri Indonesia	Panitia Kreativistara Mediacta Sriwijaya	2.000.000
3	20230203	Kegiatan Sosial	CSR Renovasi Lap Badminton	Tribun Badminton Club	1.000.000
4	20230308	Kegiatan Sosial	CSR Cabang Lahat	Panitia Musyawarah Muhammadiyah Daerah Kab.Lahat	1.000.000
5	20230324	Kegiatan Sosial	CSR Kegiatan Ramadhan	Dewan Pengurus Masjid Al Baiah	500.000
6	20230329	Kegiatan Sosial	Masjid Al Jaatsiya	Pengurus Masjid Al jaatsiyah	5.000.000
7	20230406	Kegiatan Sosial	Cabang Lahat Bantuan Sembako ke Panti Asuhan	BPR Sumsel KC Lahat	1.250.000
8	20230414	Kegiatan Sosial	Bantuan sembako KeDinas Sosial dalam rangka HUT Pemprov	Pemprov Sumsel Sekda	5.750.000
9	20230615	Kegiatan Sosial	Tournament Bola Voli Gubernur Cup	Karang taruna Dusun Pagar Alam	2.000.000
10	20230627	Kegiatan Sosial	CSR Hewan kurban Bank BPR Sumsel	Bank BPR Sumsel	21.000.000
11	20230627	Kegiatan Sosial	CSR Go To Fornas	IOSKI kota Palembang	1.000.000
12	20230728	Kegiatan Sosial	CSR Santunan Anak Yatim	Masjid Ar Rahmat	3.800.000
13	20230809	Kegiatan Sosial	CSR Bantuan Mobil Ambulance	Forum Amal Kematian Al Ikhlas 7 Ulu	500.000
14	20230823	Kegiatan Sosial	CSR Masjid Nurut Taqwa Sematang Borang	Masjid Besar Kecamatan Sematang Borang	5.000.000
15	20230918	Kegiatan Sosial	CSR Porprov Ke XIV	BPR Sumsel KC Lahat	2.000.000
16	20230922	Kegiatan Sosial	CSR Renovasi Musholla	Yayasan Al Muhajirin Palm Borang Residence	500.000
17	20230922	Kegiatan Sosial	CSR Bantuan Sosial Panti Werda	Dharma Wanita Persatuan Pemprov Sumsel	500.000
18	20231012	Kegiatan Sosial	CSR Kegiatan Lomba Pesarawi	LPPD kota Palembang	1.000.000
19	20231116	Kegiatan Sosial	CSR Kegiatan Natal	Panitia Natal dan paskah 2024 Jemaat GPIB Immanuel	1.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20	20231127	Kegiatan Sosial	CSR BPRSS Cabang Lahat	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	2.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Sumatera Selatan
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.442 PALEMBANG 30125
Nomor Telepon	: 0711379555
Modal Inti BPR	: 104.666.190.992,00
Total Aset BPR	: 212.129.193.370,00
Bobot BPR	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,1
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola Bank BPR Sumsel menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2023 adalah pada peringkat 1,100 Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur tata kelola dan proses tata kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata kelola Bank BPR Sumsel yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan mengelola risikonya. Faktor positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah BPR Sumsel senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif masih perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman dalam bekerja. Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR Sumsel senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Faktor negatif Proses Tata Kelola adalah BPR perlu tetap dilaksanakan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan dan tantangan bisnis. Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa BPR Sumsel dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencapai kinerja dengan baik. Kecukupan permodalan memadai dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,10	1,00	0.200	Pelaksanaan sudah sesuai
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,78	0,40	0,10	1,28	0.160	Pelaksanaan sudah sesuai
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	0,50	0,80	0,20	1,50	0.038	Kelengkapan dan pelaksanaan sudah sesuai
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Tidak ada benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Penerapan sudah sesuai
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,40	0,13	1,03	0.103	Penerapan sudah sesuai
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Penerapan sudah sesuai
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,46	0,10	1,06	0.106	Penerapan manajemen risiko sudah sesuai
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	BMPK sudah sesuai
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	RBB sudah disahkan dalam RUPS
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Kondisi keuangan dan keuangan sudah transparan
Nilai Komposit						1.1	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Bahwa Bank BPR Sumsel adalah BPR KU 3 dengan modal inti Rp. 104.392.169.771,- dan Aset Rp. 205.513.496.620,- (data tanggal 31 Desember 2023). Jumlah 3 direksi (Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan). Terdapat perubahan susunan Direksi yaitu berdasarkan Akta nomor 03 tanggal 02 Agustus 2023 dan Akta nomor 52 Tanggal 22 September 2023. No. S.55/KR.07/2018 tanggal 18 April 2018 Perihal Perubahan Kepengurusan BPR Sumsel untuk Direksi dan Komisaris.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Palembang Sumatera Selatan sesuai lokasi Kantor Pusat berada di Kota Palembang Sumatera Selatan
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi hanya menjabat di Bank BPR Sumsel dan tidak ada yang merangkap Jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda antara sesama Direksi dan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan dalam peraturan OJK
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK . Bpk Hendera Nomor KEP-25/KR.07/2023 tanggal 05 Juli 2023, Bpk Edi Siswanto Nomor KEP-8/KR.07/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan Bpk Bakhrum Setiawan Nomor KEP-29/KR.07/2023 tanggal 07 Agustus 2023
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi bekerja secara Independen dan Direksi tidak pernah memberikan kuasa secara umum yang sifatnya tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi sudah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan Eksternal
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi secara periodik telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap menyangkut perkembangan bisnis, isu dan permasalahan serta rencana bisnis kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan dalam rapat direksi secara strategis sudah dilaksanakan berdasarkan azas musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara Profesional, Independen dan Integritas, menjunjung tinggi kode Etik Bank BPR Sumsel dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarga
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Selama tahun 2022. Sudah dilakukan pelatihan sebanyak 81x dan biaya yang dikeluarkan Rp. 342.986.820
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi telah mengimplementasikan ilmu dan pengalaman terhadap tugas dan pokok tanggung jawab
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan Pedoman kerja, Tata Tertib Kerja, Etika Kerja , dan Waktu Kerja
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban periode 2022 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan tanggal 29 Mei 2023 secara sirkuler. Untuk RUPS tahun 2023 belum dilaksanakan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis bidang kepegawaian yang telah ditetapkan dalam RBB tahun 2022
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Setiap hasil rapat direksi selalu dibuat notulen rapat dan di tandatangani peserta rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Kinerja BPR Sumsel tahun 2022 cukup baik berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah di audit oleh KAP, semua indikator kinerja telah tercapai sesuai target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan penerapan Tata Kelola akan dilaporkan ke OJK, Perbarindo dan disampaikan Media.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	BPR Sumsel merupakan KU 3 yang memiliki jumlah komisaris paling sedikit sama dengan jumlah direksi, dimana terdapat 3 direksi. Pada bulan September 2023, salah satu komisaris independen Endang Trisna Kesumasary mengundurkan diri. Saat ini jumlah komisaris adalah Bpk Bakhnir Rasyid (Komisaris Utama) dan Bpk Hendra Jaya (Direktur Independen)
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kompetensi dan uji kepatutan (Komut Bpk Bakhnir Rasyid tanggal 04 Desember 2020 dan Bpk Hendra Jaya tanggal 10/02/2023)
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Komisaris Utama Bpk Bakhnir Rasyid berdomisili di Palembang dan Bpk Hendra Jaya berdomisili di Jakarta
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki Komisaris Utama dan 1 Komisaris independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja, waktu kerja, etika kerja dan plan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak ada komisaris yang merangkap jabatan di tempat lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Komisaris atau direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan baik secara lisan, tulisan kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Komisaris sudah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR dengan cara diskusi, meeting/rapat kinerja bersama sehingga kinerja dari direksi sesuai dengan target yang ditetapkan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam mengambil keputusan kegiatan Operasional BPR Sumsel
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjut temuan Audit baik audit internal maupun audit eksternal.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat khususnya dengan para direksi, dan termasuk dengan komite pemantau manajemen risiko dan komite pemantau audit.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan yang bersifat Strategis telah dilakukan melalui rapat komisaris dan direksi dilakukan dengan mufakat, atau sesuai dengan ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris dalam jabatannya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sumsel
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan apabila memerlukan tindak lanjut direksi.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Setiap rapat komisaris selalu di dokumentasikan baik rapat dengan komite ataupun rapat dengan para direksi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	1	Sudah Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	2	Sudah Terpenuhi
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	2	Sudah Terpenuhi
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Sudah Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	2	Sudah Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	2	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Selain PP dan kode etik juga diatur dalam PKPB dan SOP Operasional untuk mencegah benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	BPR sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan dan bila terjadi akan diungkapkan dalam setiap pengambilan keputusan dan akan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan yang bekerja secara independen dan membawahi Satker Kepatuhan dan Satker Manajemen Risiko
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direktur Kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundangan lainnya
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Tahun 2021 telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Satuan Kerja Kepatuhan menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi Kepatuhan telah memiliki ketentuan internal mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direktur Kepatuhan dan team sudah menyusun SOP tentang tata cara penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direktur Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan bagi pegawai melalui review SOP internal dan sosialisasi kepada seluruh pegawai
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direktur Kepatuhan telah melakukan upaya untuk memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat Oleh BPR kepada OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pada tahun 2023 Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT telah melakukan membuat dan melakukan pengkinian ketentuan intern sebanyak 27 ketentuan internal. (ketentuan baru sebanyak 20 ketentuan)
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR Sumsel telah melakukan upaya untuk meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal dengan cara sosialis, review peraturan perusahaan dan kampanye anti fraud

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Direktur Kepatuhan setiap bulan telah melakukan laporan kepada Direktur Utama dan tembusan ke Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direktur Kepatuhan berkomitmen menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	SKAI sudah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI BPR Sumsel telah menerapkan fungsi Audit intern independen kepada satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Berdasarkan struktur organisasi, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR Sumsel sudah menerapkan program rekrutmen dan pengembangan SDM Fungsi Audit Intern
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Fungsi audit intern BPR sumsel telah sepenuhnya menerapkan semua ketentuan sesuai dengan pedoman Audit intern

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Pihak Ekstern dalam hal ini KAP Irfan Zulmendra sudah melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank BPR Sumsel. Pemeriksaan dilakukan mulai 31 Januari 2023.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	Bank BPR Sumsel telah membuat program Peningkatan mutu SDM secara berkala terhadap fungsi audit intern dengan cara dilakukan training dan pelatihan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI telah menyampaikan laporan Pemeriksaan kpd Direktur utama dan Dewan komisaris serta Tembusan kepada Direktur Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Sumsel sudah membuat laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK pada tanggal 08 Januari 2024
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Sumsel telah menyampaikan laporan Hasil kaji ulang dari pihak ekstern KAP Irfan Zulmendra pada tanggal 30 Agustus 2023 Dan revisi kepada OJK tanggal 29 Desember 2023

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Sumsel akan selalu menerapkan ketentuan OJK termasuk laporan ke OJK terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	KAP yang ditunjuk telah sesuai standar ketentuan audit dari OJK dan disetujui Dewan Komisaris serta telah dilaporkan ke OJK baik Team KAP maupun hasil KAP.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP yang ditunjuk untuk pemeriksaan tahun buku 2023 terdaftar di OJK dan disetujui Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan KAP setiap tahunnya sudah dilaporkan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit KAP dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil Audit sudah sesuai dengan Ruang lingkup audit sebagaimana di atur dalam ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sudah terbentuk
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Satuan kerja Manajemen Risiko Bank BPR Sumsel sudah memiliki prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru di buat secara tertulis
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	Bank BPR Sumsel telah melakukan proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menerapkan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat, kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,46	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Profil Risiko Semester 2 Tahun 2023 udah dilaporkan ke OJK sudah sesuai dengan ketentuan OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR akan komitmen melaporkan kepada OJK apabila BPR membuat produk baru dan aktivitas baru. Kerjasama Bank BPR Sumsel dengan Fintech LAHAN SIKAM sudah dilaporkan dan mendapat persetujuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan sisdur terkait dengan BMPK dan termasuk didalam PKPB Bank BPR Sumsel
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR Sumsel telah memiliki dan dalam proses mengkinikan kebijakan dan sisdur terkait BMPK sesuai dengan peraturan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR Sumsel kepada pihak terkait sudah menerapkan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pada Tahun 2023 tidak ada pemberian kredit oleh BPR Yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pada Tahun 2023 tidak ada pemberian kredit oleh BPR Yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB tahun 2024 sudah dibuat Direksi dan disetujui Komisaris dan menunggu persetujuan OJK
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis dan perubahan sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB tahun 2024 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris. Dan menunggu persetujuan OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis BPR sudah mempertimbangkan Point a,b dan c sesuai dengan ketentuan BPR
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis dan perubahan sudah disampaikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sudah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan sudah sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Sumsel sudah melaksanakan transparansi informasi sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan sudah disusun sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direksi ikut menandatangani laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan sudah sesuai dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sumatera Selatan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

PALEMBANG, 26 JANUARI 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh



Hendera
Direksi

Hendera
Direktur Utama



Bakhnir Rasyid
Komisaris

Bakhnir Rasyid
Komisaris Utama

Kantor Pusat :

Jalan Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125 Telp. (0711) 379555 (Hunting) Fax. (0711) 379222

Kantor Cabang :

Lahat : Jl. Mayor Ruslan III No. 34 Kel. Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat Telp. (0731) 325622 Fax. (0731) 323733

Sekayu : Jl. KH. Wahid Udin No. 59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin Telp. (0714) 321180 Fax. (0714) 321181

Email : contact@bankbprsumsel.com

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442
Nomor Telepon : 0711-379555
Modal Inti : Rp 105.101.542.708
Total Aset : Rp 104.656.382.402
Status Audit : Wajar Tanpa Pengecualian (Tahun 2022)
Bobot BPR : D
Nilai Komposit : 1.1
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola Bank BPR Sumsel menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2023 adalah pada peringkat 1,100. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur tata kelola dan proses tata kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata kelola Bank BPR Sumsel yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan mengelola risikonya. Faktor positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah BPR Sumsel senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif masih perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman dalam bekerja. Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR Sumsel senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Faktor negatif Proses Tata Kelola adalah BPR perlu tetap dilaksanakan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan dan tantangan bisnis. Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa BPR Sumsel dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencapai kinerja dengan baik. Kecukupan permodalan memadai dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas.

Palembang, 26 Januari 2024



Hendera
Direktur Utama



Bakhnir Rasyid
Komisaris Utama

Kantor Pusat :

Jalan Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125 Telp. (0711) 379555 (Hunting) Fax. (0711) 379222

Kantor Cabang :

Lahat : Jl. Mayor Ruslan III No. 34 Kel. Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat Telp. (0731) 325622 Fax. (0731) 323733

Sekayu : Jl. KH. Wahid Udin No. 59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin Telp. (0714) 321180 Fax. (0714) 321181

Email : contact@bankbprsumsel.com